



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 5353/KPTS/PK.320/F/05/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB LOKASI

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam suatu wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota diperlukan Penanggung Jawab Lokasi ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk legitimasi pelaksanaan tugas penanggung jawab lokasi, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Penanggung Jawab Lokasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB LOKASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK).
- KESATU : Membentuk Penanggung Jawab Lokasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Lokasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Pengarah
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. Pelaksana
 - a. Tingkat Provinsi
 - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - 3) Direktur Pakan;
 - 4) Direktur Kesehatan Hewan;
 - 5) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 6) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

b. Tingkat Kabupaten/Kota.

- 1) Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 2) Koordinator Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEDUA : Penanggung Jawab Lokasi dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Pelaksana Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota dalam pengendalian dan penanggulangan PMK.

2. Pelaksana

a. Tingkat Provinsi

- 1) Memberikan arahan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan atau bimbingan pengendalian dan penanggulangan PMK;
- 2) Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayahnya;
- 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau non pemerintah serta *stakeholder* terkait;
- 4) Memberikan alternatif solusi kepada Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota terhadap kendala yang dihadapi dalam pengendalian dan penanggulangan PMK; dan
- 5) Melaksanakan tugas lainnya dari Pimpinan sehubungan dengan pengendalian dan penanggulangan PMK.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Melakukan pendampingan atau bimbingan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK;
- 2) Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayahnya;
- 3) Melakukan edukasi/sosialisasi terhadap pengendalian dan penanggulangan PMK serta dampak PMK;

- 4) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau non pemerintah serta *stakeholder* terkait;
- 5) Memberikan alternatif solusi atau penanganan sementara terhadap ternak yang diduga atau positif PMK;
- 6) Melaporkan adanya dugaan atau positif PMK;
- 7) Melaporkan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan tugas pengendalian dan penanggulangan PMK kabupaten/kota; dan
- 8) Melaksanakan tugas lainnya dari Pimpinan sehubungan dengan pengendalian dan penanggulangan PMK.

- KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai Penanggung Jawab Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,


NASRULLAH

NIP. 19660223 199303 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR 5353/KPTS/PK.320/F/05/2022
TENTANG PENANGGUNG JAWAB LOKASI
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK).

PENANGGUNG JAWAB LOKASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

No	Nama Provinsi dan PJ	No	Nama Kabupaten/Kota	PJ Kabupaten/Kota
1.	Aceh Direktur Pakan	1	Aceh Tamiang	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri;2. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan3. Subkoordinator Mutu dan Keamanan Pakan, Direktorat Pakan.
		2	Aceh Besar	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri;2. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan3. Subkoordinator Pendaftaran dan Peredaran Pakan, Direktorat Pakan.

	3	Aceh Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; 2. Subkoordinator Mutu dan Keamanan Pakan, Direktorat Pakan; dan 3. Subkoordinator Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	4	Aceh Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; 2. Koordinator Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan, Direktorat Pakan; dan 3. Subkoordinator Pencegahan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	5	Bireuen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Koordinator Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan, Direktorat Pakan.
	6	Gayo Lues	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
	7	Langsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; dan 2. Koordinator Pakan Hijauan, Direktorat Pakan.

		8	Lhokseumawe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Subkoordinator Produksi Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
		9	Pidie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Penggembalaan, Direktorat Pakan.
		10	Pidie Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Subkoordinator Produksi Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
		11	Sabang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Indrapuri; dan 2. Subkoordinator Produksi Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
2.	Sumatera Utara Direktur Pakan	12	Asahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; dan 2. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		13	Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; dan 2. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

	14	Binjai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Investasi dan Pengembangan Usaha, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan 2. Subkoordinator Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
	15	Deli Serdang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; dan 2. Koordinator Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
	16	Labuan Batu Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pakan Hijauan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Standardisasi Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
	17	Langkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; 2. Subkoordinator Surveilans dan Pengujian, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 3. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Pakan.

	18	Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Medan; 2. Koordinator Bahan Pakan, Direktorat Pakan; dan 3. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	19	Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Potong, Direktorat Pakan.
	20	Simalungun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Sapi dan Kerbau Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
	21	Tapanuli Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Kambing dan Domba Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Budidaya Pakan Hijauan, Direktorat Pakan.

3.	Riau Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	22	Indagiri Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Siborong-borong; dan 2. Subkoordinator Budidaya Pakan Hijauan, Direktorat Pakan.
		23	Rokan Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Siborong-borong; dan 2. Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		24	Siak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Bukittinggi; dan 2. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Potong, Direktorat Pakan.
4.	Sumatera Barat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	25	Agam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Bukittinggi; dan 2. Koordinator Standardisasi dan Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		26	Lima Puluh Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas; dan 2. Koordinator Investasi dan Pengembangan Usaha, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

	27	Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas; dan 2. Koordinator Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	28	Padang Pariaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Standardisasi dan Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Koordinator Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	29	Pariaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas; dan 2. Koordinator Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
	30	Pasaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Standardisasi Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Budidaya Pakan Hijauan, Direktorat Pakan.
	31	Pasaman Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Bukittinggi; dan

				2. Subkoordinator Pengembangan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		32	Payakumbuh	1. Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas; dan 2. Subkoordinator Advokasi Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		33	Sawah Lunto	1. Koordinator Investasi dan Pengembangan Usaha, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan 2. Subkoordinator Produksi Sapi Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		34	Sijunjung	1. Kepala BVet Bukittinggi; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		35	Solok	1. Kepala BVet Bukittinggi; dan 2. Subkoordinator Analisis Risiko, Direktorat Kesehatan Hewan.

		36	Solok Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Standardisasi dan Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
		37	Tanah Datar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Bukittinggi; dan 2. Subkoordinator Standardisasi dan Bio Security, Direktorat Kesehatan Hewan.
5.	Sumatera Selatan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	38	Lubuk Linggau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Sembawa; 2. Koordinator Higiene Sanitasi dan Penerapan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		39	Ogan Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Sembawa; dan 2. Koordinator Higiene Sanitasi dan Penerapan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		40	Ogan Komering Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Sembawa; dan 2. Koordinator Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

6.	Jambi Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	41	Batang Hari	1. Koordinator Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Produksi Kerbau dan Kambing Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		42	Kota Jambi	1. Kepala BPTU-HPT Siborong-borong; dan 2. Koordinator Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		43	Muaro Jambi	1. Kepala BPTU-HPT Siborong-borong; dan 2. Koordinator Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		44	Sorolangun	1. Koordinator Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Sanitary, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7.	Lampung Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	45	Lampung Timur	1. Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen PKH; dan

				2. Subkoordinator Penerapan Teknologi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		46	Mesudi	1. Subkoordinator Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan 2. Subkoordinator Pendaftaran dan Peredaran Pakan, Direktorat Pakan.
		47	Tulang Bawang	1. Kepala BBPMSOH; 2. Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Koordinator Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		48	Tulang Bawang Barat	1. Kepala BBPMSOH; 2. Koordinator Pakan Olahan, Direktorat Pakan; dan 3. Koordinator Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

8.	Bangka Belitung Direktur Kesehatan Hewan	49	Bangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Lampung; dan 2. Koordinator Zoonosis, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		50	Bangka Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Lampung; dan 2. Koordinator Zoonosis, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		51	Bangka Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Lampung; dan 2. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		52	Bangka Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Lampung; dan 2. Koordinator Zoonosis, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		53	Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Sembawa; dan 2. Koordinator Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		54	Belitung Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Potong, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

		55	Pangkal Pinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Lampung; dan 2. Koordinator Zoonosis, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
9.	Banten Sekretaris Direktorat Jenderal PKH	56	Serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBPMSOH; dan 2. Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		57	Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBPMSOH; dan 2. Koordinator Pakan Olahan, Direktorat Pakan.
		58	Tangerang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPMSP Bekasi; 2. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Pakan. dan 3. Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
10.	Jawa Barat Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	59	Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIB Lembang; dan 2. Koordinator Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		60	Bandung Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Sapi Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan

				2. Subkoordinator Surveilans dan Pengujian, Direktorat Kesehatan Hewan.
		61	Kota Bandung	1. Subkoordinator Produksi Kerbau dan Kambing Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Analisis Epidemiologi, Direktorat Kesehatan Hewan.
		62	Sumedang	1. Kepala BPMSPH Bogor; dan 2. Koordinator Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Ditjen PKH.
		63	Garut	1. Kepala BPMSPH Bogor; dan 2. Koordinator Ruminansia Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		64	Kota Cimahi	1. Subkoordinator Produksi Unggas, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2. Subkoordinator Pencegahan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.

		65	Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subdirektorat Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		66	Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Analisis Risiko, Direktorat Kesehatan Hewan.
		67	Karawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPMSP Bekasi; dan 2. Koordinator Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		68	Purwakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPMSP Bekasi; 2. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 3. Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		69	Subang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala B-Vet Subang; dan 2. Subkoordinator Produksi Kambing dan Domba Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

		70	Banjar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPMSP Bekasi; dan 2. Koordinator Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		71	Indramayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Subang; dan 2. Koordinator Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		72	Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Subang; dan 2. Koordinator Pakan Olahan, Direktorat Pakan.
		73	Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen PKH; 2. Kepala BPMSPH Bogor; dan 3. Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		74	Ciamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Standardisasi Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Standardisasi dan Bio Security, Direktorat Kesehatan Hewan.
		75	Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIB Lembang; dan 2. Koordinator Ruminansia Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		76	Kota Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIB Lembang; dan 2. Koordinator Pakan Olahan, Direktorat Pakan.

		77	Cianjur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Kelembagaan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		78	Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Sapi dan Kerbau Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen PKH.
		79	Kota Sukabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Kambing dan Domba Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Mutu Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		80	Sukabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPMSPH Bogor; dan 2. Koordinator Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Ditjen PKH.

11.	Jawa Tengah Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	82	Banjarnegara	1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; 2. Koordinator Ruminansia Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 3. Koordinator Pakan Hijauan, Direktorat Pakan.
		83	Purbalingga	1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; dan 2. Subkoordinator Pengawasan Peredaran, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		84	Banyumas	1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; 2. Koordinator Pakan Hijauan, Direktorat Pakan; dan 3. Koordinator Ruminansia Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		85	Cilacap	1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; dan 2. Koordinator Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		86	Kebumen	1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; dan 2. Koordinator Keuangan Sekretariat Ditjen PKH.

		87	Wonosobo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Subkoordinator Higiene Sanitasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		88	Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Perencanaan Sekretariat Ditjen PKH.
		89	Batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; dan 2. Subkoordinator Produksi Unggas, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		90	Kota Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BET Cipelang; dan 2. Koordinator Sanitary dan Standardisasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		91	Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BET Cipelang; dan 2. Subkoordinator Data dan Informasi, Sekretariat Ditjen PKH.
		92	Kota Tegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Subang; dan 2. Koordinator Sanitary dan Standardisasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		93	Tegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Subang; dan 2. Subkoordinator Analisis Risiko Penularan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

		94	Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBPTU-HPT Baturraden; dan 2. Koordinator Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		95	Pemalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BET Cipelang; dan 2. Subkoordinator Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		96	Kendal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BET Cipelang; dan 2. Subkoordinator Penerapan Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		97	Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; 2. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Koordinator Sanitary dan Standardisasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		98	Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Maros; 2. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Subkoordinator Standardisasi dan Registrasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

		99	Boyolali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		100	Sragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Maros; dan 2. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		101	Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Higiene Sanitasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Peredaran Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		102	Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; Koordinator Perencanaan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 2. Subkoordinator Penerapan dan Penilaian Unit Usaha, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		103	Sukoharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		104	Wonogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Penerapan dan Penilaian Unit Usaha, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

				2. Subkoordinator Produksi Sapi Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		105	Grobogan	1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		106	Blora	1. Kepala BBVet Maros; dan 2. Koordinator Higiene Sanitasi dan Penerapan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		107	Demak	1. Kepala BBVet Maros; dan 2. Koordinator Keuangan, Sekretariat Ditjen PKH.
		108	Jepara	1. Subkoordinator Monitoring dan Surveilans, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Produksi Kerbau dan Kambing Perah, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		109	Kudus	1. Kepala BBVet Maros; dan 2. Koordinator Higiene Sanitasi dan Penerapan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

		110	Rembang	1. Kepala BBVet Maros; dan 2. Subkoordinator Monitoring dan Surveilans, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta Direktur Pakan	111	Bantul	1. Kepala BBVet Wates; 2. Koordinator Perencanaan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Koordinator Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
		112	Kulon Progo	1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Bahan Pakan, Direktorat Pakan.
		113	Sleman	1. Kepala BBVet Wates; dan 2. Koordinator Perencanaan, Sekretariat Ditjen PKH.
13.	Jawa Timur Direktur Kesehatan Hewan	114	Gresik	1. Kepala Pusvetma; dan 2. Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		115	Surabaya	1. Kepala Pusvetma; dan 2. Koordinator Keuangan, Sekretariat Ditjen PKH.
		116	Mojokerto	1. Kepala BBIB Singosari; dan 2. Kepala Loka Veteriner Jayapura.
		117	Sidoarjo	1. Kepala Pusvetma; 2. Kepala Loka Veteriner Jayapura; dan

				3. Subkoordinator Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		118	Lamongan	1. Kepala Pusvetma; 2. Koordinator Keuangan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Subkoordinator Kelembagaan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		119	Tuban	1. Kepala Pusvetma; 2. Kepala Loka Veteriner Jayapura; dan 3. Subkoordinator Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		120	Bojonegoro	1. Kepala Pusvetma; dan 2. Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		121	Madiun	1. Kepala BBIB Singosari; dan 2. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

		122	Magetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBIB Singosari; dan 2. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		123	Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBIB Singosari; dan 2. Subkoordinator Mutu dan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		124	Jombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBIB Singosari; dan 2. Subkoordinator Peredaran Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		125	Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 2. Subkoordinator Pengawasan Peredaran, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		126	Pacitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Sanitary, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Produksi Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		127	Kediri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Standardisasi dan Registrasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

				2. Subkoordinator Pengembangan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		128	Kota Madiun	1. Subkoordinator Pencegahan Penularan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		129	Malang	1. Kepala BBIB Singosari; 2. Kepala Loka Veteriner Jayapura; dan 3. Subkoordinator Penerapan Teknologi Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		130	Kota Malang	1. Kepala BBIB Singosari; 2. Koordinator Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Subkoordinator Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non Pangan Olahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

		131	Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBIB Singosari; 2. Koordinator Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Subkoordinator Informasi Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		132	Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusvetma; dan 2. Subkoordinator Informasi Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		133	Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; 2. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 3. Subkoordinator Pengembangan Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		134	Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; dan 2. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		135	Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; dan 2. Koordinator Standardisasi dan Mutu Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

	136	Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; 2. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 3. Koordinator Ruminansia Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
	137	Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; dan 2. Koordinator Ruminansia Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
	138	Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Analisis Risiko Penularan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Informasi Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
	139	Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Advokasi Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Pengembangan Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

		140	Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Penerapan Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Subkoordinator Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
14.	Nusa Tenggara Barat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	141	Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BBVet Denpasar; dan 2. Subkoordinator Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		142	Lombok Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Denpasar; 2. Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Koordinator Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		143	Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Denpasar; 2. Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen PKH; dan 3. Koordinator Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
		144	Lombok Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Denpasar; dan 2. Subkoordinator Peredaran Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan
15.	Kalimantan Barat Direktur Kesehatan Hewan	145	Ketapang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Pelaihari; dan 2. Koordinator Ruminansia Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

		146	Kota Pontianak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Pelaihari; 2. Koordinator Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 3. Koordinator Ruminansia Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		147	Kubu Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPTU-HPT Pelaihari; dan 2. Koordinator Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 3. Subkoordinator Produksi Sapi dan Kerbau Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
		148	Mentawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Produksi Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 2. Subkoordinator Mutu Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		149	Sambas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Penggembalaan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		150	Sanggau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Penggembalaan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Analisis Risiko, Direktorat Kesehatan Hewan.
		151	Singkawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pakan Olahan Ternak Perah Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Standardisasi dan Bio Security, Direktorat Kesehatan Hewan.

		152	Sintang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Mutu dan Keamanan Pakan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
16.	Kalimantan Selatan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	153	Hulu Sungai Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Banjarbaru; 2. Koordinator Investasi dan Pengembangan Usaha, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan 3. Koordinator Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
		154	Tanah Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BVet Banjarbaru; 2. Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan 3. Subkoordinator Produksi Unggas, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
17.	Kalimantan Tengah Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	155	Kota Waringin Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pencegahan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 2. Koordinator Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

	156	Kota Waringin Timur	1. Kepala BVet Banjarbaru; 2. Koordinator Sanitary dan Standardisasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 3. Subkoordinator Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
	157	Sukamara	1. Subkoordinator Pendaftaran dan Peredaran Pakan, Direktorat Pakan; dan 2. Subkoordinator Sumber Daya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.
18.	Kalimantan Utara Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	158 Tarakan	1. Subkoordinator Kelembagaan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan; dan 2. Subkoordinator Pencegahan dan Penularan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 19660223 199303 1 001